
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA AMBON

Sherly Ferdinandus

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

ABSTRACT

The research aims to a) analyze the effect of Government Expenditure in the form of direct expenditure on Economic Growth in Ambon City, b) analyze the effect of Government Expenditures in the form of indirect expenditure on Economic Growth in Ambon City. The study was conducted at the Ambon Central Statistics Bureau by using secondary data, namely GRDP at 2000 Constant Prices, in 2009-2018. The analytical method used is multiple linear regression using eviews 6.0. The results are: a) Direct spending contributes positively and significantly to economic growth in Ambon City with a significance level of 5% or a confidence level of 95%; b) Indirect Expenditures contribute positively and significantly to economic growth in Ambon City with a significance level of 5% or a confidence level of 95%; c) Direct Spending and Indirect Spending together contribute positively and significantly to economic growth in Ambon City with a significance level of 5% or a confidence level of 95% with a coefficient of determination (R^2) of 96.44%

Keywords: *Government Expenditures, Economic Growth*

JEL Classification: H50, F43

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang dan merupakan fenomena penting yang di alami dunia belakangan ini. Salah satu tolak ukur yang dapat di gunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Terjadinya kenaikan atau penurunan PDRB mengidentifikasi terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang di hasilkan oleh suatu daerah. Oleh karena itu PDRB dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan ekonomi suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana dan pembiayaan maka pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berlaku selama satu tahun. Belanja daerah ini adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Bland dan Nunn). Sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang di anggarakan Tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi, karena penduduk bertambah terus sehingga kebutuhan ekonomi juga bertambah maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan modal dan sumber pembiayaan sebagai faktor penting dalam proses Pertumbuhan ekonomi yang diaktualisasi dalam bentuk Sektor-sektor ekonomi di Kota Ambon, seperti tabel dibawah ini :

Tabel (1) Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2018

No	Sektor Ekonomi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata
1.	Pertanian	256.534,8	267.586,9	278.303,6	219.815,6	316.605,5	405.128,6	435.999,7	449.978,1	471.660,1	453.352,7	256.534,83
2.	Pertambangan	1.637,21	1.720,71	1.808,83	1.902,65	2.165,98	16.008,93	17.573,58	19.098,38	20.542,13	21.916,77	1.637,21
3.	Industri, Pengolahan	28.914,76	32.320,92	34.211,96	36.794,96	38.399,22	243.315,72	265.892,15	282.701,44	305.715,09	232.477,1	28.914,76
4.	Listrik, gas, Air bersih	10.566,79	11.304,14	11.465,11	9.529,76	10.259,44	9.788,17	10.805,50	11.240,51	14.900,38	14.917,97	10.566,79
5.	Bangunan/Konstruksi	9.539,84	10.265,97	11.066,73	12.031,58	18.858,30	66.771,30	69.592,12	71.448,86	75.945,15	76.635,70	9.539,84
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	341.674,0	365.183,8	389.237,9	413.458,6	437.888,1	285.683,3	313.655,8	337.934,0	362.357,4	381.441,2	341.674,09
7.	Pengangkutan, komunikasi	272.445,5	295.215,0	315.057,6	330.404,7	364.280,6	1.366.180	1.501.692	1.624.006	1.661.200	1.769.744	272.445,59
8.	Keuangan, persewaan, jasa	117.888,3	123.973,0	130.713,0	138.044,9	141.008,1	680.069,6	762.945,4	774.682,4	840.667,9	870.062,3	117.888,39
9.	Jasa-jasa	382.789,4	404.048,2	429.017,8	456.288,1	473.202,3	200.397,1	218.042,4	237.343,8	247.564,0	269.699,8	382.789,47
	PDRB	1.421.990	1.511.618	1.600.864	1.618.271	1.802.667	3.273.342	3.596.199	3.808.434	4.000.552	4.090.248	1.421.990,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2019

Tabel diatas dijelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sembilan sektor yang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atas dasar harga konstan selama 10 tahun dihitung dari tahun 2009 sampai pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 4.090.248,26 tetapi juga pada tahun 2008 mengalami penurunan pendapatan terendah dengan nilai sebesar 1.551.618,89. Dari data diatas memperlihatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dari sembilan sektor dapat dilihat pada tahun 2013 dengan jumlah sebesar 1.802.667,73 dari tahun ke tahun

pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon akan terus meningkat dan dapat di lihat pada tahun 2017 sebesar 3.596.199,11. Sedangkan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dengan jumlah 4.000.552,70.

Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pada tahun 2009, rincian belanja pemerintah pusat masih terdiri dari: pengeluaran, pengeluaran rutin dan, pembangunan. Namun sejak tahun 2010 mulai diterapkan penyatuan anggaran (*unified budget*) antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Tabel (2) Belanja Pemerintah Daerah Kota Ambon
Tahun 2009 - 2018

Tahun	Pengeluaran Pemerintah		Pertumbuhan %	
	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2009	176.765.069	98.143.148	8,670	2,896
2010	117.378.244	175.012.218	5,757	5,326
2011	147.657.385	205.618.355	7,242	6,257
2012	211.681.000	243.182.960	10,383	7,400
2013	270.326.768	272.030.307	13,260	8,278
2014	317.607.00	336.829.000	15,579	10,250
2015	203.475.955	344.842.604	8,813	10,494
2016	183.211.186	476.273.664	8,986	14,494
2017	189.826.165	524.057.317	9,311	15,489
2018	220.716.712	609.847.235	10,826	18,559

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2019

Data diatas pada tahun 2009, belanja langsung mempunyai nilai sebesar 8,670% kemudian dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebesar 13,260% dan tahun 2014 sebesar 15,579%. Sedangkan pada belanja tidak langsung pada tahun 2009 dengan nilai sebesar 2,986% kemudian pada tahun-tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat fluktuasi pada tahun 2018 sebesar 18,559%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan perekonomian di kota Ambon.

Adanya peran pemerintah tercermin lewat pengeluaran pemerintah guna meningkatkan pembangunan ekonomi maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Ambon. Hal ini terlihat pada tabel diatas tentang pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja langsung dan Belanja tidak langsung.

Uraian diatas, penulis mencoba melakukan penelitian dengan menganalisa kondisi dan realisasi

masyarakat terutama dua faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. (belanja langsung dan belanja tidak langsung) yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Ambon. Dalam hal ini penulis mencoba menuangkan melalui penelitian dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Ambon.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh belanja langsung dan tidak langsung Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota ambon, dengan demikian tujuannya adalah untuk menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk belanja langsung dan tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kota Ambon.

LANDASAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Teori Ekonomi Keynes

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi *Great Depression*, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah.

Pergerakan aktifitas perekonomian dari tahun ke tahun ditentukan oleh 3 hal yang dalam perekonomian makro saling berkaitan satu dengan lainnya; yaitu: Produksi, Pendapatan dan Permintaan. Interaksi ketiganya dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Perubahan permintaan untuk barang menyebabkan perubahan produksi
- b. Perubahan produksi menyebabkan perubahan pendapatan
- c. Perubahan pendapatan menyebabkan perubahan permintaan barang

Produk Domestik Bruto (Y) adalah jumlah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Dari segi

pendekatan pengeluaran, Pendapatan Nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor tersebut adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintahan dan sektor perdagangan internasional. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat (C), pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan (I), pengeluaran sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintahan (G), sedangkan pengeluaran perdagangan dengan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor Negara yang bersangkutan ($X-M$).

Analisa Pendapatan Nasional mempunyai 2 pendekatan model perekonomian yaitu:

1. Perekonomian 2 sektor (Rumah Tangga dan Badan Usaha)

$$Y = C + I$$

2. Perekonomian 3 sektor (Rumah Tangga, Badan Usaha, Pemerintah)

$$Y = C + I + G$$

Jumlah dari C , I dan G mencerminkan pembelian barang dan jasa oleh konsumsi rumah tangga, badan usaha dan pemerintah. Untuk menentukan pembelian barang dan jasa domestik, harus diketahui ekspor bersih atau net export yaitu dengan mengurangi Impor dan menambahkan Ekspor. Impor merupakan pembelian barang dan jasa dari luar negeri oleh konsumen dan perusahaan domestik, dan pemerintah. Ekspor merupakan pembelian barang dan jasa domestik oleh pihak asing.

Teori Rostow dan Musgrave.

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, ini ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak

menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)

Pengamat empiris oleh Adolf Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB.

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Pengeluaran Pemerintah

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang di hasilkan yang memuat pemilihan atau keputusan yang di muat oleh pemerintah untuk menyiapkan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan masing-masing tingkatan Pemerintah (Pusat, Provinsi, Daerah) Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal

yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dolumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah (*region*). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran, yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum anggaran berimbang adalah suatu kondisi dimana penerimaan sama dengan pengeluaran ($G = T$). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan ($G < T$) sedangkan anggaran defisit adalah anggaran dimana komposisi pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan ($G > T$). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun (harga yang mengalami perubahan sesuai dengan ekonomi yang terjadi), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar harga konstan. Kegunaan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun (BPS Provinsi Maluku dalam angka 2015).

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut Badan Pusat Statistik adalah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor

perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi

Berdasarkan keyakinan bahwa perekonomian tidak akan menghadapi masalah kekurangan permintaan agregat, selanjutnya menurut ahli-ahli ekonomi klasik permintaan agregat ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian dalam penghasilan barang dan jasa dalam suatu periode tertentu, misalnya setahun, tingkat teknologi dan jumlah barang-barang modal yang dianggap tetap jumlahnya. Dengan demikian pada dasarnya tingkat produksi nasional yang dapat di ciptakan ditentukan oleh dua faktor (Sadono Sukimo, 2000) yaitu:

- a. Tingkat kesempatan kerja yang di capai dalam perekonomian
- b. Kemampuan tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lain untuk menghasilkan barang dan jasa.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau provinsi dalam periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa untuk menghitung Angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang kerap digunakan dalam melakukan perhitungan. (Boediono, 2002) yaitu:

Pendekatan Produksi

PDRB merupakan nilai produksi netto dari barang dan jasa yang di hasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu netto (1 tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian di kelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha, yaitu. Sektor Pertanian, Pertambangan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah jasa yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang diterima adalah upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan di kurangi pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua komponen permintaan akhir seperti: pengukuran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung konsumen, pemerintah pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor netto.

Dalam penelitian ini PDRB di interpretasikan menurut pendekatan produksi dalam perhitungan yang di jumlahkan adalah nilai tambah dari produksi atau *value added* yang di ciptakan.

Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Bland dan Nunn.) Kelompok belanja langsung menurut Permendagri 13 tahun 2006 pasal 50 yaitu: (a) belanja pegawai yaitu merupakan pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah (b) belanja barang dan jasa yaitu merupakan pengeluaran pemerintah/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas (12) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, (c) belanja modal yaitu merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian /pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan dan jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian /pengadaan dan pembangunan aset tetap terwujud yang di anggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangunan aset.

Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang di tetapkan berdasar peraturan perundang – undangan yang di berikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang di pekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal kegiatan (Bland dan Nunn 2001)

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang di pasarkan

maupun tidak di pasarkan, dan pengadaan barang yang di maksud untuk diserahkan atau di jual kepada masyarakat dan belanja perjalanan kegiatan (Bland dan Nunn 2001).

Belanja barang antara lain dapat dikelompokkan dalam tiga kategori belanja yaitu:

- a. Belanja pengadaan barang dan jasa.
- b. Belanja pemeliharaan.
- c. Belanja perjalanan.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, (Munir,2003).

Aset adalah sumber daya ekonom yang di kuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai dari akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan di harapkan dapat di peroleh baik itu pemerintah maupun masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum, dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah.

Belanja modal dapat di kategorikan dalam lima (5) kategori umum (Munir,2003)

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan jaringan
- e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Pendapatan para ahli sebagai berikut :

- a) Menurut Halim (2004:73) belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.
- b) Menurut Munir (2003:36) menyatakan hal sanada belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagi pertimbangan dalam pengalokasian.
- c) Menurut Bland dan Nunn menyatakan pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Hubungan belanja modal dan belanja pemeliharaan pada pemerintah daerah, proses penyusunan anggaran mencakup dua komponen belanja yang memiliki sirkulus berbeda, yakni siklus anggaran operasional yang menghasilkan rencana keuangan bagi aktifitas pemerintah yang berjalan terus- menerus dan sirkulus anggaran belanja modal, yang merupakan perencanaan untuk pendapatan peralatan, bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya (Bland dan Nunn, 2002)

Secara teoritis apabila suatu organisasi melakukan suatu kebijakan untuk membelanjakan dana dari anggaran yang sudah ditetapkan untuk belanja modal, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap anggaran operasional dan pemeliharaan organisasi tersebut (Bland dan Nunn, 2002) juga menentukan bahwa capital outlays memiliki implikasi positif yang tidak ambigu terhadap perasional dimasa yang akan datang.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang di anggarkan Tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang di berikan kepada PNS yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang represtasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepada daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penenimaan lainnya yang di tetapkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah belanja yang di gunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang di hitung berdasarkan kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan dan jangka panjang.

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan di gunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan lembaga tertentu agar harga jual produksi barang dan jasa yang di hasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak tertentu. Perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk dan jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah belanja yang telah di anggarkan untuk di berikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dana tau jasa. Hibah dapat di berikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/ BUMN/ BUMD/ Badan/ Lembaga Organisasi Swasta, ataupun kelompok masyarakat dan perorangan

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk membenikan bantuan kepada organisasi masyarakatan, partai politik, dan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- a) Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan untuk sosial, secara selektif mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.
- b) Bantuan partai politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang – undangan sebagai bantuan social.

Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota, kepada Desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan hasil terdiri dari :

- a. Belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi
- b. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja bagi hasil pajak kepada pemerintah Desa
- d. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota
- e. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan keuangan dalam pembentukan bantuan keuangan terbagi menjadi dua sifat yaitu:

1. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengolahan diarahkan/ di tetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
2. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ Pemerintah Desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah Provinsi
2. Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota
3. Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa
4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah daerah lainnya

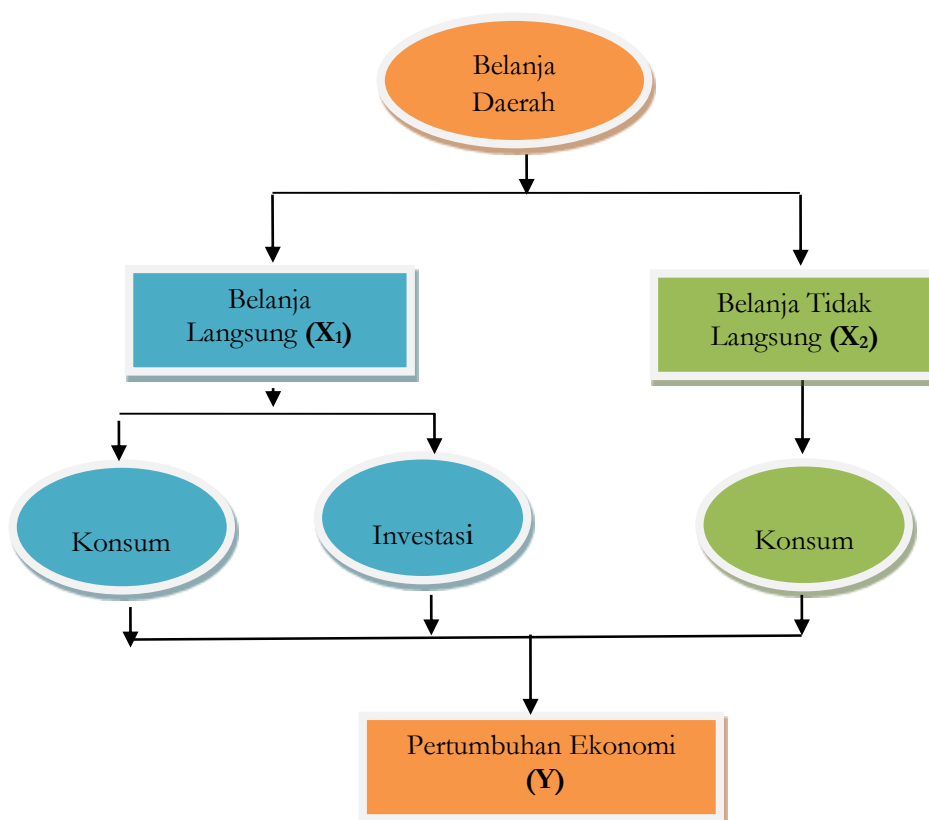
Perbedaan Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung

Di dalam struktur Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) terdapat apa yang di namakan dengan Belanja Pegawai. Mungkin cukup membingungkan Anda untuk membedakan keduanya. Untuk itu terlebih dahulu kita mengetahui pengetiannya serta contohnya dilapangan.

Belanja Langsung : Belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Contohnya ; Belanja Pegawai : Honor : merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai , tetapi apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. (dia bekerja / produktivitas dan berkaitan dengan tujuan oraganisasi)

Belanja Tidak Langsung : Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Contohnya ; Belanja Pegawai : Gaji. (Mau kerja atau tidak kerja tetap diterima, sehingga tidak ada produktivitas) Dengan demikian kita bisa memahami perbedaan yang mendasar antara keduanya. Semoga bisa dipahami.

Kerangka Pemikiran



Gambar (1) Kerangka Pemikiran

Dari Kerangka pemikiran diatas diduga pengeluaran pemerintah dari belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menjelaskan hubungan yang mempengaruhi dan di pengaruhi dari variable yang akan diteliti. Menggunakan kuantitatif karena data yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variable dinyatakan dengan angka atau numerik (Kuncoro, 2003).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS, Bapeda dikota Ambon, berdasarkan waktu yaitu dari tahun 2009-2018.

Metode Analisis

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu belanja

langsung/ belanja pembangunan dan belanja tidak langsung (belanja rutin) dan analisis kualitatif akan digunakan juga untuk menganalisis perkembangan pertumbuhan ekonomi (PDRB) provinsi Maluku selama periode tertentu.

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah jenis belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap PDRB atau pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku dengan model ekonometrika yaitu model Regresi linier berganda (dalam bentuk *double log* yaitu: $Y=f(X_1, X_2)$)

$$\ln. Y = \beta_0 + \beta_1 \ln. X_1 + \beta_2 \ln. X_2 + e \quad (1)$$

Di mana :

- Y = Pertumbuhan ekonomi,
- X_1 = Belanja Langsung,
- X_2 = Belanja Tidak Langsung,
- β_0 = Intersep (konstanta)
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi
- e = Error tem (variabel gangguan)

\ln = Logaritma natural.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial / Individual (uji t)

Untuk menganalisis Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon secara parsial maka dirumuskan hipotesis penelitian statistik satu sisi (*one tail*) sebagai berikut :

- Koefisien Regresi Variabel Produksi Perikanan (X).
 $H_0 : \beta_1 \geq 0$: Produksi Perikanan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah .

- Formula untuk mendapatkan nilai t- statistik (t-hitung) adalah

$$t\text{-hitung} = \frac{\beta_k}{Se(\beta_k)}$$

Dimana β_k adalah koefisien variabel bebas adalah kesalahan baku (*standard error*)

- Kreterian pengambilan keputusan
Jika t hitung > t tabel maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan diterima hipotesis alternatif (H_1)
 - Apabila t hitung < t tabel maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak.
Atau dapat melihat nilai probabilitas (p-value) t statistik dari paket *program software* Gretl 1.9 dengan kriteria sebagai berikut:
 - Apabila nilai probabilitas (p-value) < a (1 % 5% dan 10%) maka ditolak hipotesis nol (H_0) dan diterima hipotesis alternatif. (H_1)
 - Apabila nilai probabilitas (p-value) > a (1 % 5% dan 10 %) maka diterima hipotesis nol (H_0) dan ditolak hipotesis alternatif (H_1).

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara statistik melalui uji- f digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi dapat mempengaruhi variabel dependen secara simultan/ bersama-sama atau tidak, dalam penelitian ini rumusan pengujian hipotesis melalui uji-f adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$, : berarti variabel independen (belanja langsung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, : berarti variabel independen (belanja langsung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah)

Formula untuk mendapatkan nilai f-statistik (f – hitung) adalah :

$$F\text{-hitung} = x = \frac{R^2 / (K-1)}{1-R^2 / (n-k)}$$

Dimana : R^2 adalah koefisien n adalah jumlah observasi k adalah banyaknya parameter (koefisien) regresi + konstanta)

F-kritis (F tabel) ditentukan dengan memprhitungkan derajat kebebasan (df) nomerator (k1) dan df (n-k).

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Jika F Hitung > F tabel (kritis), maka kita menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_1) denumerator
- Jika F hitung < F tabel (kritis), maka kita menerima hipotesis nol (H_0) dan menolak hipotesis alternatif (H_1) dapat melihat nilai probabilitas (p-value) F- statistik dari paket program /software gretl 1.9 dari kriteria sebagai berikut:
 - Apabila nilai probabilitas (p- value) < a (1 % 5% dan 10 %) maka ditolak hipotesis nol (H_0) dan diterima hipotesis alternatif (H_1).
 - Apabila nilai probabilitas (p- value) > a (1 % 5 % dan 10 %) diterima hipotesis nol (H_0) dan ditolak hipotesis alternaif (H_1).

Koefisien Determinasi (*goodness of fit*). Yang dinotasikan dengan R^2 , merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatnya garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya.

Nilai koefisien determinasi R^2 ini mencerminkan seberapa besar dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variabel dari Y tidak dapat diterangkan oleh variabel X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variabel dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berda tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 -nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Formula untuk memperoleh koefisien determinasi dapat diperoleh

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{\sum(Y-Y)^2}{\sum(Y-Y)^2}$$

Atau

$$= 1 - \frac{\sum \hat{e}^2}{\sum (yt)}$$

Pengujian Asumsi Klasik

Model regresi berganda yang telah dibuat melanggar asumsi-asumsi klasik maka uji-F tidak sah (valid) secara ilmiah (Gujarati, 2003; Widarjono, 2009). Karena itu, uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan parameter regresi langung (*spurious regression*) atau regresi palsu yaitu menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih yang nampaknya signifikan secara statistik tetapi pada kenyataannya tidak demikian atau tidak sebesar yang nampak pada parameter regresi yang dihasilkan.

Keberadaan parameter langung dalam suatu penelitian mengakibatkan interpretasi terhadap parameter regresi yang dihasilkan dapat menyesatkan dan melanggar kaidah-kaidah ekonometrika (Gujarati, BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)) maka hasil estimasi tidak boleh ada multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas dan harus lolos dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi klasik dapat dari hasil estimasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hasil uji-t dan uji -F tidak valid (sah) jika variabel pengganggu atau residual tidak terdistribusi secara normal. Banyak metode yang digunakan untuk menguji normalitas model, namun dalam penelitian ini digunakan *normality residual test software gretl 1.9*. Adapun kriteria untuk mengetahui normal atau tidaknya dari faktor pengganggu adalah sebagai berikut:

- Bila nilai NR hitung (X^2_{hitung}) > nilai X^2_{tabel} maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, μ berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

Uji Autokorelasi

Dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross-sectional*). Secara sederhana dapat dikatakan model klasik mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun (Gujarati, 2003). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Breusch – *Godfrey serial*

correlation LM (uji lagrange multiplier) yang dapat dijalankan dengan program / software gretl 1.9 ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada tabel *chi-square* (X^2).

- Apabila nilai probabilitas (p-value) dari T*R-Squared $< \alpha = 5\%$ maka terima H_1 (terdapat autokorelasi).
- Apabila nilai probabilitas (*p-value*) dari T*R-Squared $> \alpha = 5\%$ maka terima H_0 (tidak terdapat autokorelasi)

Uji Heteroskedastisitas

Adalah dimana faktor pengganggu tidak memiliki variabel yang sama. Adanya heteroskedastisitas dalam model analisis mengakibatkan variabel dan koefisien-koefisien OLS tidak lagi minimum dan penaksiran – penaksiran OLS menjadi tidak efisien meskipun penaksiran OLS tetap tidak dan konsisten. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah uji white heteroskedasticity, yang dapat dilakukan pada distribusi dengan *chi-square* (X^2).

- Apabila nilai probabilitas (*p-value*) dari T*R-Squared $< \alpha = 5\%$ maka terima H_1 (terdapat heteroskedastisitas).
- Apabila nilai probabilitas (p-value) dari T* R-Squared $> \alpha = 5\%$ maka terima H_0 (tidak terdapat heteroskedastisitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perekonomian Kota Ambon

Kota Ambon sebagai pintu gerbang masuknya barang dan jasa dari dan ke wilayah lain di Provinsi Maluku, Regional, dan Nasional. Transaksi perdagangan menjadi hidup sebagai akibat dampak ikutan dari belanja kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang belanja pemerintahan dan belanja aparatur dilakukan dikota ini. Fenomena menarik yang ditemukan adalah maraknya dan tingginya sumbangan Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya bagi perekonomian di Kota Ambon. Selain kebutuhan akan transportasi yang memadai, kepemilikan sepeda motor juga diduga telah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat di Kota Ambon. Berdasarkan data UPTB Pendapatan Kota Ambon di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, maka jumlah kendaraan bermotor pribadi Kota Ambon

tahun 2014 adalah 166.696 unit, terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 22.009 unit (13,20%), dan kendaraan roda dua sebanyak 144.687 unit (86,80%). Jika dibandingkan jumlah penduduk Kota Ambon tahun 2014, maka kepemilikan kendaraan roda dua di Kota Ambon cukup tinggi, yaitu 1 kendaraan bermotor roda dua untuk 2,8 orang, atau hampir setiap rumah tangga memiliki kendaraan roda dua. Fenomena ini tentunya dapat berdampak pada ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, jika tidak dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan perekonomian di Kota Ambon didominasi oleh aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan. Berdasarkan struktur ekonomi maka terdapat 5 aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan yang utama yaitu (1) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (3) Transportasi dan Pergudangan, (4) Informasi dan Keuangan, serta (5) Jasa Keuangan dan Asuransi, yang secara keseluruhan menyumbang sebanyak 69,88% dari PDRB Kota Ambon.

Beberapa aktivitas menunjang Kota Ambon sebagai kota jasa, juga tergambar dari kontribusi jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan social, dan jasa

lainnya, yang mencapai 10,35% dari total PDRB. Hal ini memberikan harapan untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik bagi aktivitas jasa ke depan. Jika mengamati struktur ekonomi Kota Ambon tahun 2014 yang cenderung dinamis, maka trend struktur ekonomi tahun 2015, diperkirakan tidak berubah jauh dari kondisi tahun 2014, dengan aktivitas-aktivitas jasa dan perdagangan.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Salah satu indikator yang umumnya digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu daerah digunakan ukuran Pertumbuhan Ekonomi. Proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

Pada penelitian ini mempunyai data lengkap tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap sembilan sektor pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun yaitu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel (3) PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2018 (dalam %)

Tahun	PDRB	Prosentase (%)
2009	1.421.990,97	-
2010	1.511.618,89	0,063
2011	1.600.883,71	0,059
2012	1.618.271,08	0,011
2013	1.802.667,73	0,114
2014	3.273.342,88	0,816
2015	3.596.199,11	0,099
2016	3.808.434,42	0,059
2017	4.000.552,70	0,050
2018	4.090.476,57	0,022

Sumber: BPS Kota Ambon, Tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa PDRB pada tahun 2011 ke tahun 2012 meningkat sebesar

1.618.271,08 atau sebesar 0,011% dan peningkatan ini yang terkecil dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB

pada tahun yang lainnya. sedangkan pada tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat sebesar 3.273.342,88 atau meningkat sebesar 0,816%. Ini merupakan peningkatan PDRB terbesar dibandingkan dengan tahun yang lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis berganda yang merupakan persamaan regresi dengan 2 (dua) atau lebih variabel (Gujarati, 2003) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis Statistik

Tabel (4) Hasil Estimasi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ambon

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2966930	0.705570	4.205017	0.0029
LNX1	0.800061	0.039587	2.121709	0.0276
LNX2	2.037407	0.206827	9.850765	0.0000
R-squared	0.946672	Mean dependent var		21.94840
Adjusted R-squared	0.931435	S.D. dependent var		0.801164
S.E. of regression	0.209783	Akaike info criterion		-0.042157
Sum squared resid	0.308064	Schwarz criterion		0.048619
Log likelihood	3.210785	Hannan-Quinn criter.		-0.141738
F-statistic	6.213163	Durbin-Watson stat		1.468760
Prob(F-statistic)	0.000035			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel diatas dapat memberikan informasi penting tentang ringkasan hasil estimasi model regresi linear berganda mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon yang mencakup antara lain hasil estimasi parameter regresi berganda, pengujian hipotesis (uji-t dan uji-F), nilai koefisien determinasi (R -squared, R^2), koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R-squared*) dan indikator Durbin-Watson. Untuk memperjelas hasil penelitian ini maka akan dikemukakan secara rinci mengenai hasil pengujian hipotesis (uji-t dan uji-F), koefisien determinasi yang disesuaikan dan interpretasi serta pengujian asumsi klasik sebagai berikut:

Uji Signifikansi Parameter Secara Individual (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara parsial atau

individual. Hasil pengujian hipotesis melalui uji-t dijelaskan sebagai berikut:

a. Intersep/Konstanta

Dari hasil estimasi yang telah dilakukan sebagaimana tampilan Tabel 4 dengan menggunakan bantuan *software Eviews-6.0* maka diperoleh nilai intersep atau konstanta sebesar 2.966930 yang dapat diinterpretasikan bahwa apabila belanja langsung dan tidak langsung konstan atau tidak berubah maka rata-rata pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 2,97%.

b. Koefisien Regresi

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.2 yang memuat pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Diperoleh koefisien regresi X_1 yang dinotasikan dengan (β_1) sebesar 0.8000 Nilai koefisien variabel X_1 (β_1) tersebut ternyata berpengaruh positif secara statistik pada tingkat signifikansi α (alfa) = 5 % atau

tingkat kepercayaan 95 %. Dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas (*p-value*) uji-t dengan tingkat signifikansi α (alfa) = 5 % atau dengan membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien regresi X_1 (β_1) memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,0276 < 0,05$ ($\alpha=5$ %) dan ditunjukkan oleh nilai t-hitung/ t-statistik sebesar $2,12170 > t$ -tabel (1,81246) yang menunjukkan bahwa secara statistik hasilnya positif dan signifikan.

Koefisien regresi variabel X_1 yang dinotasikan dengan β_1 sebesar 0,080 mengandung arti bahwa apabila jumlah belanja langsung menurun sebesar 1 % maka akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon sebesar 0,080% dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).

2. Diperoleh koefisien regresi variabel X_2 yang dinotasikan dengan (β_2) sebesar 2.037407. Nilai koefisien variabel X_2 (β_2) tersebut ternyata berpengaruh positif signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α (alfa) = 5 % atau tingkat kepercayaan 95 %. Dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai probabilitas (*p-value*) uji-t dengan tingkat signifikansi α (alfa) = 5% atau membandingkan t-statistik/t-hitung dengan t-tabel. Tampilan hasil estimasi memperlihatkan bahwa uji-t untuk koefisien regresi variabel X_2 (β_2) memiliki nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,0000 < 0,05$ ($\alpha=5$ %) atau ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar $9.85076 > t$ -tabel (1,81246).

Koefisien regresi variabel X_2 (β_2) sebesar 2.037407 mengandung arti bahwa apabila jumlah belanja tidak langsung bertambah sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon sebesar 2,04 % dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan).

Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji-F)

Dalam regresi linear berganda, uji-F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (belanja langsung dan belanja tidak langsung) terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi secara

simultan atau bersama-sama. Caranya adalah dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) output *software EVIEWS* dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5$ % atau membandingkan nilai F-statistik dengan F-tabel. Apabila nilai probabilitas (*p-value*) $< \alpha=5$ %) atau nilai F-statistik $> F$ -tabel maka berarti secara statistik menerima hipotesis H_a dan menolak hipotesis H_0 .

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai F-statistik sebesar 6,213163 dan memiliki nilai probabilitas (*p-value*) F-statistik sebesar $0,000035 < 0,05$ ($\alpha= 5$ %) atau nilai F-statistik/F-hitung sebesar $6,213163 > F$ -tabel (4,737414128) yang menunjukkan bahwa hipotesis H_0 ditolak. Dengan kalimat lain, dapat dikatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon pada tingkat signifikansi $\alpha=5$ % atau tingkat kepercayaan sebesar 95 %.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R-squared*, R^2) digunakan untuk menguji *goodness of fit* dari model regresi yang dapat diketahui dari besaran nilainya. Besaran nilai koefisien determinasi (R^2) dapat memberikan informasi seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel terikat.

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-squared*, R^2) sebesar 0,946672 yang mengandung arti bahwa variasi pertumbuhan ekonomi mampu dijelaskan oleh variabel belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar 94,66 % sedangkan sisanya sebesar 5,34 % dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 94,66% mengindikasikan bahwa spesifikasi model regresi yang dibangun sudah tepat karena memiliki persamaan regresi yang memenuhi kelayakan model (*goodness of fit*).

Pengujian Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas atau kolinearitas antar variabel bebas dengan menggunakan matriks korelasi. Adapun hasil uji multikolinearitas dapat diamati pada tampilan tabel berikut:

Tabel (5). Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi

Variabel bebas	LNX ₁	LNX ₂
LNX ₁	1.000000	0.650275
LNX ₂	0.650275	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tampilan tabel diatas diketahui bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinearitas/sudah terbebas dari masalah multikolinearitas karena hubungan/korelasi semua variabel bebas menghasilkan nilai matriks korelasi $< 0,80$.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah salah satu penyimpangan terhadap asumsi klasik yang ditunjukkan oleh adanya serial korelasi variable gangguan (*error term*) dari waktu ke waktu.

Tabel (6) Uji Autokorelasi Metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test			
F-statistic	0.256593	Prob. F(2,5)	0.7833
Obs*R-squared	0.930834	Prob. Chi-Square(2)	0.6279

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengujian pada Tabel 6 menunjukkan bahwa indikator *Obs*R-squared* tidak signifikan secara statistik dengan indikator mengamati nilai probabilitas *Obs*R-squared* sebesar $0,6279 > 0,05$ ($\alpha=5\%$), yang berarti menolak H_0 atau menyatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Asumsi yang lain dari model regresi linear klasik (CLRM) adalah unsur gangguan (*disturbance*) dalam model regresi adalah homoskedastisitas, artinya unsur gangguan tersebut memiliki varians yang sama

Tabel (7) Hasil Uji *WHITE*

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	5.337301	Prob. F(5,4)	0.0649
Obs*R-squared	8.696495	Prob. Chi-Square(5)	0.1218
Scaled explained SS	7.442031	Prob. Chi-Square(5)	0.1898

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan pengujian pada Tabel 7. dapat diperoleh informasi bahwa data yang digunakan/model yang dibangun tidak menghadapi masalah heteroskedastisitas, dengan indikator *Obs*R-squared* yang tidak signifikan secara statistik atau nilai probabilitas *p-value* *Obs*R-Squared* sebesar $0,1218 > 0,05$ artinya tidak signifikan secara statistik atau model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

Analisa Ekonomi

Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil estimasi model sebelumnya, di peroleh koefisien regresi variable belanja langsung yang dinotasikan dengan β_1 sebesar $0,080006$ mengandung arti bahwa apa bila belanja langsung meningkat sebesar 1% maka akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon sebesar $0,08\%$ dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain dianggap konstan)

Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang di pengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari, belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun

barang yang ditetapkan menurut undang-undang (Bland & Nunn, 2001); belanja barang/ jasa merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang di pasarkan maupun tidak di pasarkan, dan pengadaan barang yang di maksud untuk diserahkan atau di jual kepada masyarakat dan belanja perjalanan kegiatan (Bland dan Nunn 2001); dan belanja modal merupakan anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset, (Munir,2003).

Priyo Hari Adi (2006), dengan judul penelitian Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, belanja daerah dan pendapatan asli daerah (Studi Pada kabupaten dan kota seJawa Bali) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD; Belanja daerah memberikan dampak positif terhadap PAD.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa alokasi anggaran belanja langsung pemerintah berkontribusi yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini berindikasi bahwa alokasi anggaran belanja langsung pemerintah belum banyak berpengaruh terhadap peningkatan yang terjadi pada sektor yang diteliti. Pemerintah juga mempunyai peran serta andil yang besar bagi peningkatan atau pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan, hal ini bisa terwujud apabila pemerintah juga fokus dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat memberikan kontribusi pada agregat pendapatan asli daerah.

Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil estimasi sebelumnya diperoleh koefisien regresi variabel belanja tidak langsung (β_2) sebesar 2,037407 mengandung arti bahwa apabila jumlah belanja tidak langsung bertambah 1% maka akan meningkat pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon sebesar 2,04% dengan asumsi *ceteris paribus* (faktor-faktor lain yang dianggap konstan).

Secara teori di atas, sesuai dengan pernyataan bahwa belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan

keuangan, dan belanja tidak terduga. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian untuk alokasi belanja tidak langsung, mempunyai korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, serta mempunyai signifikan positif dengan pertumbuhan ekonomi yang diteliti sehingga bisa disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai andil dalam pembangunan sektor ekonomi namun, tidak melalui alokasi anggaran investasi tetapi secara tidak langsung melalui pengembangan sektor ekonomi yang ada dibawahnya namun melalui alokasi anggaran yang dianggarkan untuk hibah, sosial, dan lain-lain yang secara otomatis meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan belanja masyarakat.

Sedangkan apabila dua alokasi anggaran ini digabungkan ternyata memberikan output hasil yang sangat besar dan signifikan terhadap peningkatan yang terjadi pada sektor ekonomi yang diteliti.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

1. Belanja Langsung (X_1) berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%.
2. Belanja Tidak Langsung (X_2) berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%.
3. Belanja Langsung (X_1) dan Belanja Tidak Langsung (X_2) secara bersama-sama berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Implikasi

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merekomendasikan agar : pemerintah Kota Ambon dapat lebih memperhatikan pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui pengembangan sektor sektor ekonomi di Kota Ambon yang dianggarkan secara

- otomatis agar meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan beli masyarakat.
2. Bagi para peneliti yang lain dalam penelitian selanjutnya untuk menggunakan data dengan periode waktu yang berbeda dan variabel yang spesifik lagi, dan periode penelitian dilakukan dalam periode yang lebih panjang sehingga memberikan gambaran yang lebih baik terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dapat hasil penelitian yang lebih akurat, pada sektor ekonomi dikota Ambon khususnya pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Statistik dan Bappeda Provinsi Maluku 2000
Maluku Dalam Angka, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim.(2004). *Mengemban Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba.
- Sadono Sukimo. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Bland, Robert Dan, Samuel Nunn. (1992). *The Impact Of Capital Spending On Municipal Operating Budgets. Public Budgeting And Finance* (Sumber). 324
- Sadono Sukimo. (2000). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Arief, Sritua, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Arsyad, Lincolin. (2008). *Ekonomi Pembangunan, atakankedua*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- BPS, (2019). *Realisasi pendapatan asli daerah di provinsi Maluku tahun 2009-2018*, Ambon.
- BPS, (2019). *PDRB atas dasar harga konstan 2000 di provinsi Maluku tahun 2009-2018*, Ambon.
- Ginjar Kartasasmita, (2006). *Pembangunan untuk Rakyat: memadukan Pertumbuhan dan Perencanaan*, Jakarta: Cides.
- Gujarati, Damodar, (2006). *Ekonomika Dasar: Edisi Keenam*, Jakarta: Erlangga.
- Kumajo, (2008). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Edisi Keenam*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sukimo, (2008). *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Kencana Grup.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Maluku Dalam Angka 2009 - 2018

Halaman ini sengaja dikesongkan